

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN



CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2023

KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

L PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan dimiliki oleh:

- I. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor I tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Surat Direktur Barang Milik Negara Nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014.

- **Entitas Pelaporan**

Sekretariat Kornisi Pernilaian Umum Kota Pariaman merupakan satuan kerja unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB) tingkat Eselon III.

- **Periode Laporan**

Periode Laporan yang disajikan dalam Catatan Laporan Barang Milik Negara ini adalah untuk periode pelaporan yang berakhir periode TA 2022.

II. KEBIJAKAN PENATA SAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak tennasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu. dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai at.au dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua betas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bula tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi nonnal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan., Irigasi. dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

- Aset Tetap

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ilcan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam prose pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambungkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasan untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun
- d. Suht untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

- Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

III PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Wilayah Kota Pariaman.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode Semester II TA 2023 ini adalah sebesar **Rp.6.766.513.270,-** (*Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*),- yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp. 6.512.456.745,-** (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dan terdapat mutasi di Semester II TA 2023 senilai **Rp.254.056.525,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*). Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Serita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Sekretariat Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Wilayah Kota Pariaman ;
14. Laporan PNBPN yang terlcait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2023 menurut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebesar **Rp. 6.512.456.745,-** (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp 6.503.113.745,-** (*Enam Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp. 9.343.000,-** (*Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Semester II TA 2023

Mutasi BMN per pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Barang Persediaan**

Saldo Persediaan di dalam aplikasi SAKTI Modul Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 200.508.125,- (Dua Ratus Juta Lima Ratus Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)**. Terdapat mutasi barang persediaan di Semester II tahun 2023 berupa bahan lainnya yang merupakan alat kelengkapan TPS pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

2. **Tanah**

Saldo Tanah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.585.303.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)**. Jumlah tersebut merupakan saldo awal tanah seluas 1.731 m² dengan nilai sebesar **Rp.585,303,000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)** dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2023.

3. **Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 yang merupakan barang intrakomptabel dan ekstrakomptabel adalah sebesar **Rp2.304.832.946, (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)**. Terdapat mutasi pada periode Semester II tahun 2023 senilai senilai **Rp.254.056.525,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** berupa belanja peralatan dan mesin dengan rincian:

No	Kode>Nama Barang	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Jenis
1	3050105/ALAT KANTOR LAINNYA	41.816.880	6.950.000	CCTV - Camera Control Television System
2	3050204/ALAT PENDINGIN	64.721.000	19.400.000	2 unit A.C. Split
3.	3050206/ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	48.986.552	17.457.325	Televisi dan Braket Standing Peralatan
4	3060102/PERAL ATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	25.450.100	3.400.000	1 unit Camera Conference dan 1 unit stand speaker

No	Kode>Nama Barang	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Jenis
5	3060201/ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	6.599.945	4.129.200	4 unit Handy Talky (HT)
6	3060347/Sumber Tenaga	0	47.400.000	1 unit Genset
7	3080141/ Alat Laboratorium Pertanian	0	62.180.000	3 umit personal komputer
8	3100102/Personal Komputer	496.938.2 55	58.560.000	3 unit laptop
9	3100203/Peralatan Personal Komputer	305.075.0 50	15.000.000	6 unit printer
10	3150405/Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	0	19.580.000	2 unit AC

1) 3.02 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

Saldo Alat angkutan darat bermotor pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar **Rp.715.395.000,-** (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*). Tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2023.

2) 3.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

Saldo Alat kantor dan rumah tangga pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 485.375.141,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*). Terdapat mutasi pada Semester II TA 2023 berupa pembelian 2 unit ac split, televisi dan standing braket senilai **Rp.26.350.000,-** (*Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu*) sehingga saldo alat kantor dan rumah tangga pada Semester II Tahun 2023 senilai **Rp. 511.725.141,-** (*Lima Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

3) 3.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

Saldo Alat studio, komunikasi dan pemancar pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 92.729.245,-** (*Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*). Terdapat mutasi pada Semester II TA 2023 senilai Rp.54.929.200,- (*Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*). Penambahan saldo berupa pembelian 1 unit Camera Conference, 1 unit Camera Conference, 1 unit stand speaker dan 1 unit genset.

4) 3.07 ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN

Saldo Alat kedokteran dan kesehatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Semester II TA 2023 pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.498.000 (*Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) berupa 2(dua) unit thermogun yang digunakan sebagai penunjang kegiatan perkantoran. Tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2023.

5) 3.08 UNIT ALAT LABORATORIUM

Terdapat penambahan terhadap kode barang unit alat laboratorium komputer berupa 3 unit personal komputer berupa PC unit sebesar **Rp. 62.180.000,-** (*Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Ini akan menjadi salah satu target dilakukannya reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar guna memperbaiki kode barang menjadi peralatan personal komputer (3.10)

6) 3.10 KOMPUTER

Saldo Komputer pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 903.848.235,-** (*Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dan terdapat mutasi pada Semester II TA 2023 sebesar **Rp. 93.140.000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) berupa pembelian 3 unit laptop, 6 unit printer dan 2 unit AC.

7) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Semester II TA 2023 adalah sebesar **Rp. 1.929.361.235,-** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

Denj!;an rincian nilai aset oeralatan dan mesin seba gai berikut:

Korle	Kelompok Barane:	Akumulasi (Rp.)
L	Intrakompatabel dan Ekstrakompatabel	
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	643.950.000
3.05.01	Alat Kantor	198.549.289
3.05.02	Alat Rumah Tangga	282.355.284
3.06.01	Alat Studio	22.255.100
3.06.02	Alat Komunikasi	11.212.865
3.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	403.337
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	3.886.250
3.10.01	Komputer Unit	453.672.005
3.10.02	Peralatan Komputer	309.728.105
3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	979.000
	JUMLAH	1.929.361.235

C. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 3.598.742.000,-** (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar **Rp. 3.598.742.000,-** (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan tidak terdapat mutasi pada Semester II TA 2023.

1) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.538.109.494,-** (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

c. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 277.635.324,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Tidak terdapat mutasi pada Semester II tahun 2023.

1. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II Tahun Anggaran 2023
 - a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 4.212.572.342,-** (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan Lainnya, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam proses pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	117131	Bahan Baku		200.508.125,
2	131111	Tanah	585.303.000,	585.303.000,
3	132111	Peralatan dan Mesin	2.041.433.421,	2.295.489.946,
4	133111	Gedung dan Bangunan	3.598.742.000,	3.598.742.000,
5	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.807.851.825,)	(1.929.361.235,)
6	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(455.323.418,)	(538.109.494,)
7	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	277.635.324,	277.635.324,
8	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(277.635.324,)	(277.635.324,)
			3.962.303.178	4.212.572.342

Rincian nilai Akumulasi Penyusunan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna

Tahunan Tahun Anggaran 20223 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	URAIAN RACA	INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABL E		GABUNGAN	
		Kn	-;	Rn		Ro	o/e
I	AsetLancar						
I	PersediaanlaiMva		0		0		0
	Sub Jumlah (1)		0		0		0
II	Aset Tetap	6.479.534.946	95,6	9.343.000	0,1	6.488.877.946	95,7
	Tanah	585.303.000	9			585.303.000	9
	Peralatan dan Mesin	2.295.489.946	31 4	9,343.000	01	2.304.832.946	31,5
	Gedun dan Bangunan	3.598.742.000	55 2			3.598.742.000	55,2
	Sub Jumlah (2)	6.479.534.946	95,6	9.343,000	0,1	6.488.877.946	95,7
III	Aset lainnva	277.635.324	4,3			277.635.324	4,3
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Pemerintahan	277.635.324	4,3			277.635.324	4,3
	Sub Jumlah (3)	277.635.324	4,3			277.635.324	4,3
	Jumlah	6.757.170.270	99,9	9.343.000	0,1	6.757.170.270	100

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 per alum neraca adalah sebagai berikut:

N o	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan Lainnva	-	-	-
2	Tanah	585,303.000	585.303.000	-
3	Peralatan dan Mesin	2.304.832.946	2.304.832.946	-
4	Gedung dan Banmman	3.598.742.000	3.598.742.000	-
5	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi Pemerintahan	277.635.324	277.635.324	-
	Total	6.757.170.270	6.757.170.270	-

V. INFORMASI BMN LAINI'YA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (Jima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	NilaiBMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester I Tahun 2021	6.525.896.491	362.955.446	5,9
2	Semester II Tahun 2021	6.437.687.191	-88.209.300	1,37
3	Semester I Tahun 2022	6.420.545.745	-26.484.446	0,41
4	Semester II Tahun 2022	6.503.113.745	82.568.000	1,3
5	Semester I Tahun 2023	6.503.113.745		0
6	Semester II Tahun 2023	6.757.170.270	254.056.525	3,9

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		Rp	Rn
1	Tanah	585.303.000	
2	Peralatan dan Mesin	483.809.333	1.821.023.613
3	Gedung dan Bangunan	3.598.742.000	
4	Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	277.635.324	
	Jumlah	4.945.489.657	1.821.023.613

3. Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Rarang.

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak. berat yang sudah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

NO	SATIJAN KERJA	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	KPU Kota Pariaman	277.635.324.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Pennasalahan-pennasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

Dalam melaksanakan tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu inventarisasi Barang Milik Negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 388/Kpts/Setjen/fAHUN 2016 tanggal 2 Agustus 2016, belum bisa diselesaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dikarenakan:

1. masih terdapatnya aset yang belum ditetapkan status penggunaannya dan saat ini masih menunggu Surat Keputusan KPU RI mengenai hal ini;
2. Belum terbitnya Surat Keputusan KPU RI tentang penghapusan aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi Pemerintahan untuk segera dilakukan penghapusan.

7. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada KIL, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait dan jajarannya (DJKN, Kanwil DJKN, KPKNL) untuk meningkatkan kualitas laporan BMNKPU.
- b. Dalam penatausahaan persediaan akrual di lingkungan KPU Kota Pariaman, setiap bulannya, operator meminta kepada bendahara pengeluaran untuk menyerahkan dokumen sumber pencatatan barang persediaan yang berasal dari jenis belanja akun 5218 (Belanja Harang Persediaan), akun 523 (Belanja Barang Pemeliharaan) dan akun 52 (Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda). Dokumen sumber yang dimaksud berupa faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atas belanja barang/persediaan yang dilakukan oleh masing-masing Subbagian. Dokumen sumber tersebut diserahkan kepada operator melalui Sub Bagian Umum paling lambat tanggal 25 setiap bulannya. Dengan sudah berhasilnya dilakukan migrasi ke aplikasi SAK.TI menjadikan bendahara menjadi filter pertama dalam pengklasifikasian kode barang akibat dari akun belanja persediaan sehingga memudahkan operator untuk melakukan pendetailan di SAKTI modul persediaan.
- c. Masih terdapatnya salah input kode barang sehingga membutuhkan reklas masuk dan reklas keluar yang disetujui oleh KPU RI.

Penanggung Jawab Laporan Barang Kuasa
Pengguna
Sekretaris,



DARLIS, S.Sos, MM
Nip.196805011998031004

1. Penyusunan Laporan Tahunan 2017

Penyusunan laporan tahunan merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, tim penyusunan laporan tahunan telah dibentuk dan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

1. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

2. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

2. Penyusunan Laporan Tahunan 2017

Penyusunan laporan tahunan merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, tim penyusunan laporan tahunan telah dibentuk dan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

1. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

2. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

3. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

4. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

5. Tim penyusunan laporan tahunan akan melaksanakan tugasnya secara profesional dan obyektif.

Penyusunan Laporan Tahunan 2017



17/03/2018
17/03/2018



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman

BERITA ACARA OPNAME FISIK

Nomor: 646/RT.01.2-BA-XII/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribun Dua Puluh Tiga, telah dilakukan opname fisik persediaan dimana barang-barang persediaan yang masih tersisa sampai akhir tahun 2023 adalag sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Ket
1.	Segel Plastik Pemilu 2024	7.513	buah	Baik	
2.	Segel Plastik Pemilu 2024 (Pembulatan)	1	Buah	Baik	
3.	Bilik Suara Pemilu Tahun 2024	1.156	unit	Baik	
4.	Tinta Pemilu Tahun 2024	578	buah	Baik	
5.	Segel Pemilu Tahun 2024	27.864	buah	Baik	
6.	Kantong Plastik Besar Pemilu 2024	2.890	buah	Baik	
7.	Kantong Plastik Sedang Pemilu 2024	289	buah	Baik	
8.	Kantong Plastik Kecil Pemilu 2024	578	buah	Baik	
9.	Kantong plastik Ziplok Pemilu 2024	289	buah	Baik	
10.	Kartu Tanda Pengenal Saksi Pemilu 2024	8.381	buah	Baik	
11.	Karet Pengikat Surat Suara Pemilu 2024	125.532	buah	Baik	
12.	Lem Perekat Pemilu 2024	654	botol	Baik	
13.	Ballpoin Pemilu 2024	2.202	buah	Baik	
14.	Spidol Kecil Pemilu 2024	3.571	buah	Baik	
15.	Spidol Besar Pemilu 2024	12	buah	Baik	
16.	Alat Untuk Mencoblos Pemilu 2024	1.156	unit	Baik	
17.	Kartu tanda Pengenal KPPS Pemilu 2024	2.023	buah	Baik	
18.	Kartu Tanda Pengenal Petugas Ketertiban Pemilu 2024	578	buah	Baik	
19.	Stiker Label Kotak Surat Suara Pemilu 2024	2.890	buah	Baik	

20.	Kotak Suara Pemilu 2024	1453	Unit	Baik	
21.	Sampul Biasa Pemilu 2024	5.809	Lembar	Baik	
22.	Sampul Kubus Pemilu 2024	10.186	Lembar	Baik	

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 29 Desember 2023

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang



DARLIS

Pengelola Barang Persediaan,

TRI UDAYANI